

TESIS
EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK) PADA SISTEM KETATANEGARAAN DI
INDONESIA SETELAH DIBENTUK UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019



PHILIPUS FRANCIS RACO

No. Mhs : 215214464

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2024



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

**PERSETUJUAN
TESIS**

Nama : PHILIPUS FRANCIS RACO

Nomor Mahasiswa : 215214464

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Judul Tesis : EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) PADA SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA
SETELAH DIBENTUK UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
-----------------	---------	--------------

Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.	7 Februari 2024	
--	-----------------	---

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.	20 Februari 2024	
----------------------------------	------------------	---



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : PHILIPUS FRANCIS RACO
Nomor Mahasiswa : 215214464
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PADA SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA SETELAH DIBENTUK UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 1 Maret 2024

Dewan Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, SH.,M.Hum
2. Sekretaris Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
3. Anggota Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Rekan Fakultas Hukum



FAKULTAS
HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PHILIPUS FRANCIS RACO

No.Mahasiswa : 215214464

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PADA
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA SETELAH DIBENTUK
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Manado, 30 Januari 2024

Yang menyatakan:

.....

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan tesis dari awal hingga akhir. Penulisan tesis dengan judul “EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PADA SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA SETELAH DIBENTUK UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019” sebagai syarat dalam memperoleh derajat Magister Hukum (M.H) pada program studi pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dalam menyusun tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak melalui dukungan moral dan non-moral. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Yohanes Triyana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini boleh selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang penuh keikhlasan dan kesabaran dalam arahan, saran, dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.
6. Kedua Orang tua saya serta keluarga besar saya, yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis selama proses penulisan tesis ini.

7. Teman-teman Kawanua yang sama-sama merantau dan menuntut ilmu di Yogyakarta selalu menghibur dan menyemangati sampai penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulis juga berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Penulis,

Philipus Francis Raco



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	0
<i>ABSTRACT</i>	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Urgensi Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi.....	22
B. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang.....	34
C. Kedudukan KPK Pada Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Setelah Dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	39
D. Landasan Teori.....	41
1. Teori Ilmu Negara.....	41
2. Teori Pembagian Kekuasaan.....	43
a. Teori John Locke.....	43
b. Teori Montesquieu.....	44
3. Teori Negara Hukum.....	45
E. Batasan Konsep.....	47
BAB III.....	46

METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Metode Analisis Data	49
E. Sistematika Penulisan	51
BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Tuntutan Dasar Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK	56
1. Pengertian Independensi	56
2. Independensi KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	59
3. Keberadaan Dewan Pengawas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019	61
B. KPK Sebagai Amanat Konstitusi yang Independen dan Berada di ranah Eksekutif	72
BAB V	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Pasca penetapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkembang diskusi yang mempersoalkan independensi KPK dan eksistensi sebagai lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji KPK sebagai lembaga yang independen, eksistensinya serta kaitannya dengan sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu menelaah ketetapan dan keputusan hukum terkait dengan KPK sebagai lembaga independen, eksistensinya dalam sistem Ketatanegaraan. Pendekatan hermeneutika dilakukan untuk melihat secara mendalam makna, konteks dan pengalaman terkait dengan istilah, rumusan terkait. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa independensi KPK setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dimaknai sebagai tidak adanya ketergantungan, bebas dalam menentukan kebijakan KPK adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif karena melaksanakan tugas administrasi yaitu berkoordinasi, mensupervisi, memonitor, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK sebagai lembaga eksekutif berarti bahwa KPK adalah lembaga pemerintah yang mengambil bagian dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini membatasi kajiannya pada aspek independensi dan eksistensinya pada sistem Ketatanegaraan di Indonesia sesudah penetapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

Kata Kunci : KPK; Independensi; Eksistensi; Eksekutif; Yuridis Normatif

ABSTRACT

After the enactment of Law No. 19 of 2019 concerning the second amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, a discussion developed that questioned the independence of the Corruption Eradication Commission and its existence as a state institution within the executive power group, this thesis examines the Corruption Eradication Committee as an independent institution, its existence and its relationships to the Indonesian constitutional system. This research uses a normative juridical approach, namely examining legal provisions and decisions related to the Corruption Eradication Commission as an independent and its existence in the constitutional system. A hermeneutic approach examines the meaning, context, and experiences related to related terms and formulations. This research confirms that the independence of the Corruption Eradication Committee after the formation of Law No. 19 of 2019 was understood as the absence of dependence on freedom in determining policies. The Corruption Eradication Committee (KPK) is a state institution within the executive power group because it carries out administrative duties : coordinating, supervising, monitoring, conducting investigations, investigating, and prosecuting. The KPK as an executive institution means that it is a government institution that implements government power. This research limits its study to aspects of independence and its existence in the Indonesian constitutional system after the enactment of Law No. 19 of 2019 .

Keywords : *KPK; Independence; Existence; Executive; Juridical Normative*